

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PENAMBAHAN BEBAN PEKERJAAN DI LUAR KONTRAK KERJA**

**(Studi Kasus Home Industri Pembuatan Kue di Perumahan Permata Biru
Sukarame Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi

Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1

dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

DWI OKTAVIANI

NPM : 1521030351

Program studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1441 H/2020 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PENAMBAHAN BEBAN PEKERJAAN DILUAR KONTRAK KERJA**
(Studi di Home Industri Pembuatan Kue Perumahan Permata Biru Sukarama
Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh:

DWI OKTAVIANI

NPM: 1521030351

Program Studi: Mu'amalah

Pembimbing I : Drs. H. Mundzir HZ., M.Ag.

Pembimbing II: Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag. M.S.I.

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441H / 2020 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Supaya tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam memahami judul sekripsi ini, maka secara singkat terlebih dahulu penulis akan menguraikan maksud dari sekripsi ini. Adapun penelitian ini memiliki judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENAMBAHAN BEBAN PEKERJAAN DILUAR KONTRAK KERJA (Studi di Home Industri Pembuatan Kue Perumahan Permata Biru Sukarame Bandar Lampung)”. Untuk mengetahui pokok pembahasan yang terkandung dalam judul tersebut, perlu memberikan pembahasan sebagai berikut:

1. Tinjauan, adalah pendapat, meninjau atau hasil dari sebuah penyelidikan dan seterusnya.¹
2. Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah SWT. Yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Al-Qur'an, dalam arti fiqih adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.² Menurut Prof. H. Amir Syarifuddin dalam bukunya Ushul Fiqih menyebutkan, hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul, tentang tingkah laku

¹ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 4, (Jakarta:Gramedia,2008), h.1470.

²Hasbi Ashiddieqi, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta:CV.Mulia, 1996), h. 48.

manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama.³

3. Hukum Positif adalah salah satu bagian hukum, ditinjau menurut waktu berlakunya. Hukum positif atau bisa disebut dengan *Ius Constitutum*, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Singkatnya, hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu.⁴
4. Penambahan Beban adalah proses, cara, perbuatan menambahkan sesuatu. Dalam hal ini adalah menambahkan beban pekerjaan yang dilakukan pemilik usaha kepada karyawan.
5. Pekerjaan adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara pemilik usaha dengan para pekerja atau karyawan, kemudian pekerja akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari pihak pemilik usaha.⁵
6. Kontrak kerja adalah suatu kesepakatan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha baik dalam bentuk tulisan maupun lisan yang memuat poin-poin dari hak dan kewajiban dari kedua belah pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.10.

⁴ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2001), h. 21.

⁵ Imam Sjah Putra Tunggal, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, (Jakarta: Harvindo 2013), h.50.

⁶ Suharwardi K. Lubus, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.163.

Dari penjelasan istilah-istilah diatas maka dapat ditegaskan bahwa yang di maksud dengan judul penelitian ini adalah, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penambahan Beban Pekerjaan di Luar Kontrak Kerja (Studi di Home Industri Pembuatan Kue Perumahan Permata Biru Sukarame Bandar Lampung), adalah untuk memahami bagaimana pemahaman berdasarkan tinjauan hukum Islam dan Hukum Positif mengenai hubungan kerja antara pemilik usaha dan karyawan, sudah sesuaikah hak dan kewajiban yang diberikan dan diterima antara kedua pihak.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun hal-hal yang mendorong penulis untuk membahas judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

- a. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah merupakan salah satu masalah praktek muamalah yang sementara tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat.
- b. Terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai praktek perjanjian kerja antara karyawan dan pemilik usaha

2. Alasan Subjektif

- a. Sejauh yang penulis ketahui, permasalahan ini belum pernah dibahas dalam judul skripsi, khususnya di Fakultas Syari'ah.

- b. Karena ruang lingkup pembahasan termasuk dalam salah satu bidang ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah, yakni fiqih mu'amalah.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT tidak terlepas dari berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan jasmanai maupun kebutuhan rohani. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia selalu membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain, karena tidak seorang manusiaapun mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka pergaulan dalam hidupnya merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindari. Dalam pergaulan hidup ini setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain begitu juga sebaliknya. Sehingga sering kali butuh kerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan dalam melakukan hubungan kerja yang baik, saling tolong-menolong yang saling menguntungkan tanpa saling merugikan antara kedua pihak.

Dalam Qur'an surat Al-ma'idah ayat 2 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا الْقَلْبَدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا

عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S.; al-Ma'idah (5):2).⁷

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami secara global bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk tolong menolong dalam berusaha dan bekerja, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Namun Islam tidak mewajibkan untuk memilih bentuk usaha pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya serta ketrampilan yang dimilikinya. Islam tidak menentukan jenis atau bentuk kerja yang lebih baik asalkan halal, baik dan terhormatnya itulah yang dibenarkan Islam.

Masalah ketenagakerjaan menurut Islam termasuk dalam bidang muamalah, khususnya bab *ijarah* (sewa-menyewa). Sedangkan *ijarah* adalah memanfaatkan

⁷Usman Al-Quruby, *Al-Qur'an Cordoba*, (Bandung:Cordoba Internasional, 2016), h.106.

jasa sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan *ajir* (tenaga kerja), maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Semua hal tersebut di dalam Undang-Undang disebut dengan perjanjian kerja.⁸

Indononesi sebagai Negara hukum memberikan jaminan hidup dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Demikian pula perlindungan hak asasi manusia merupakan kewajiban pemerintah dalam melakukan fungsi pelayanan, pengawasan, maupun penindakan pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Cita hukum dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat, pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja wajib menjamin aspek keadilan yang pada gilirannya dapat mewujudkan nilai kemanfaatan bagi kepentingan pelaku ekonomi dan pengguna produksi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dimana isi dari Undang-Undang tersebut sudah tercantum sebagai hal yang mencakup tentang peraturan untuk para pekerja dan para pelaku usaha.⁹ Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

⁸ Taqoyudin An Nabhani, An Nidlam Al-Istihadi Fil Islami, *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), h.84.

⁹ Lalu Hasni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.56.

Menurut pemaparan diatas dapat dilihat bahwa bukan hanya hukum islam yang melindungi hak-hak kaum pekerja atau buruh, bahkan dalam hukum positif batasan pekerjaan pekerja atau buruh sudah ada ketentuannya yang dituangkan dalam undang-undang supaya hak-hak para pekerja terlindungi.

Hal yang melatarbelakangi terjadinya hubungan kerjasama salah satunya adalah untuk pemenuhan kebutuhan yang ingin dicapai seorang individu. Sebab lain adalah ketidakmampuan atau kurangnya kesempatan yang dimiliki seorang individu untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya, di sisi lain ada pihak yang tidak memiliki sumber daya namun mempunyai keahlian dan tenaga untuk bekerja, hubungan seperti itulah yang melahirkan istilah pengusaha dan karyawan. Satu pihak mempunyai sumber daya, pihak lain mengelola sumber daya tersebut, dan pemilik sumber daya memberikan upah atas pekerjaan yang dilakukan. Dari hubungan kerjasama tersebut lahir hak dan kewajiban, keduanya adalah komponen yang sangat penting dalam suatu hubungan kerjasama. Hak yang diberikan kepada pekerja atau karyawan harus sesuai dengan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Sebaliknya, pemilik sumber daya juga harus memenuhi kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Semua komponen-komponen tersebut dirumuskan dalam sebuah perjanjian kerja.

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu (buruh) mengikatkan dirinya untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak lainnya (majikan), yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh itu dengan

membayar upah.¹⁰ Apabila perjanjian kerja tersebut ditaati dan dilaksanakan dengan itikad baik maka akan menciptakan kondisi yang tenang dalam bekerja dan terjaminnya hak dan kewajiban para pihak. Akibatnya produktivitasnya semakin meningkat, lebih jauh lagi pengusaha dapat melebarkan usahanya untuk melahirkan lapangan kerja baru.¹¹

Terlepas dari itu semua, Home Industri Pembuatan Kue di Perumahan Permata Biru merupakan salah satu dari sekian banyaknya kegiatan usaha yang terbilang sudah cukup lama usianya dan tidak ada perjanjian tertulis dalam pengaturan kontrak kerjanya. Penerimaan tenaga kerja di Home Industri Pembuatan Kue tersebut dimulai dari mulut ke mulut, kemudian yang sudah bekerja di Home Industri itu mengajak saudara, tetangga atau temannya bagi yang membutuhkan pekerjaan.

Home Industri Pembuatan Kue di Perumahan Permata Biru adalah salah satu bentuk usaha rumahan yang memiliki paling banyak enam orang karyawan, dan empat pekerja yang lain adalah sebagai pekerja panggilan jika dibutuhkan. Para karyawan bekerja dimulai dari pukul 05.30 sampai selesainya pekerjaan. Idealnya para karyawan hanya mengerjakan pekerjaannya sebagai pembuat kue, namun realitanya para karyawan mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh pemilik usaha, seperti membersihkan rumah, menyetrika pakaian, belanja dan mengantarkan kue kepasar.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h.113

¹¹ Zaeni Asyhadi, *Hukum Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.45.

Menurut pemaparan diatas yang menjadi alasan penulis untuk meneliti kontrak kerja di Home Industri Pembuatan Kue Perumahan Permata Biru Sukarame Bandar Lampung, yaitu adanya hal yang samar dalam kontrak kerja. Pada saat calon karyawan diterima bekerja hanya menjelaskan pekerjaan yang dilakukan dan upah kerja yang dijelaskan secara lisan. Sehingga hal tersebut menimbulkan keluhan bagi para karyawan, dimana pekerjaan dan waktu pekerjaannya itu tidak ditentukan atau tidak ada batasan.

Melihat permasalahan yang demikian timbul pertanyaan, sudah sesuaikah antara hak dan kewajiban yang diterima dan diberikan oleh karyawan. Sebaliknya, sudah sesuaikah antara hak dan kewajiban yang diterima dan diberikan oleh pemilik usaha untuk mencapai lingkungan serta hubungan kerja yang baik dan nyaman.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakan masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek perjanjian kerja di Home Industri Pembuatan Kue Perumahan Permata Biru Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap penambahan beban pekerjaan diluar kontrak kerja di Home Industri Pembuatan Kue Perumahan Permata Biru?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktek penambahan beban pekerjaan di Home Industri Pembuatan Kue Perumahan Permata Biru.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai pelaksanaan perjanjian kerja dan penambahan beban pekerjaan di Home Industri Pembuatan Kue Perumahan Permata Biru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dalam lingkup dan jangkauan hukum Islam dan hukum positif.
- b. Penelitian ini digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi majikan atau pemilik usaha dan pekerja untuk mengetahui bagaimana perjanjian kerja menurut hukum Islam dan hukum positif.
- c. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri (UIN) Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan teknis dengan menggunakan fikiran secara seksma untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian ini sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan

untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹²

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini, pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini peneliti langsung terjun kelokasi penelitian yaitu di Perumahan Permata Biru Sukarame Bandar Lampung.
- b. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan.¹³

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah semua informasi baik yang merupakan peristiwa/gejala baik secara kuantitatif ataupun kualitatif. Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

¹² Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset*, (Bandung: Alumni Bandung, 1986), h.28.

¹³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*. (Bandung: Mondar Maju, 1996), h.81.

a. Data Primer

Data primer yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini dapat diperoleh dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yaitu karyawan atau pemilik usaha.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitian.¹⁴ Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk memperkuat penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan karyawan atau pemilik usaha.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, mungkin beberapa manusia, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 11 orang, yang terdiri dari 10 orang karyawan dan 1 orang pengelola usaha yang ada di Home Industri Pembuatan Kue Perumahan Permata Biru Sukarame Bandar Lampung.

¹⁴Juliansyah Noor, *Metodologi dan Penelitian:Skripsi,Tesis,Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta:Kencana, 2011), h. 34.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Untuk menentukan ukuran sampel yang digunakan rumusan yang dikemukakan oleh Arikunto yang apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika jumlah subjeknya besar, maka dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih. Karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, yaitu berjumlah 11 orang, maka semua populasi dijadikan sampel. Jadi sampel yang diteliti adalah 11 orang, yang terdiri dari 10 orang karyawan dan 1 orang pengelola usaha yang ada di Home Industri Pembuatan Kue Perumahan Permata Biru Sukarame Bandar Lampung.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, maka metode yang digunakan yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.¹⁵

¹⁵Etta Manang Sungatji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dalam Penelitian)*, (Yogyakarta: C.V Andi, 2010), h. 44

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). Dengan cara penelitian melakukan tanya jawab dengan karyawan atau pekerja yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada karyawan terkait bagaimana praktik pelaksanaan sistem kontrak kerja tersebut, yang selanjutnya akan ditinjau dari hukum Islam.

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau (*low data*) terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahanyang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b. Sistematisasi Data (*sistemastizing*)

Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu penambahan beban pekerjaan di home industri pembuatan kue, dimana tanpa adanya kejelasan dari awal perjanjian, dan ditinjau dari hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, tujuannya agar dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif, yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai sistem pelaksanaan sistem kontrak kerja sebagaimana yang ada dalam hukum Islam dan hukum positif.

Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan pelaksanaan sistem kontrak kerja dan hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perjanjian Kerja (Akad)

1. Perjanjian Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Akad

Ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut pihak pertama. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan *ijab*.¹

Akad secara etimologi adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Menurut terminology ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus.

Secara umum pengertian akad menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanafiyyah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti *wakaf*, *falak*, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai. Secara khusus pengertian

¹ Ghufon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.76.

akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.²

Akad yaitu perikatan, perjanjian dan pemufakatan, pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek ikatan. Semua perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan, dan kesepakatan untuk membunuh orang.³

b. Landasan Hukum Akad

1) Surat Al Maidah ayat 1

إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۚ

Artinya: Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

2) Surat Al Imran ayat 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝٧٦

² Racmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. ke-3, 2006), h. 43.

³ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 101.

Artinya: (Bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.(Q.S Al-Imran: 76).⁴

c. Rukun Akad

Menurut pengertian fuqaha' rukun adalah asas, sendi atau tiang. Yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan tertentu dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu. seperti rukun' dan sujud merupakan sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya shalat, keduanya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perbuatan shalat. Dalam muamalah, seperti ijab dan qabul dan orang yang menyelenggarakan akad tersebut. Menurut jumhur ulama rukun akad ada tiga, yaitu *aqid* (orang yang menyelenggarakan akad, seperti penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (harga dan barang yang ditransaksikan), dan *shighatul 'aqd* (bentuk ucapan akad).⁵

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhoan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:

1) *Aqid*

Ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan

⁴*Ibid.*

⁵ Nur Huda, *Fiqih Muamalah*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h.111.

pembeli dipasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memilih haq (*akid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.

2) *Ma'qud 'alaih*

Ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.

3) *Maudhu' al'aqd*

Ialah tujuan atau maksud pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibbah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada penggant (*i'iwadh*). Tujuan pokok akad ijarah adalah pemberian manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok ijarah adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.

4) *Sighat al-'aqd*

Ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

Dalam istilah *ushul fiqih* orang yang mempunyai kecakapan bertindak disebut dengan *ahliyat al-'ada*, namun ada beberapa faktor yang menjadi penghalang seseorang melakukan perbuatan hukum (melakukan kontrak syariah). Menurut Ahmad Azhar Basyirada beberapa sebab seseorang terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu:⁶

- a) Gila, bila seseorang berakad dalam keadaan gila atau tidak waras maka tidak sah akad tersebut.
- b) Rusak akal, dalam suatu pelaksanaan akad seseorang harus dalam keadaan yang waras, pengertian rusak akal dapat disamakan dengan pengertian gila.
- c) Mabuk, seseorang yang sedang mabuk tidak boleh melakukan perbuatan hukum atau melakukan kontrak dikarenakan orang tersebut dalam pengaruh alcohol yang memabukan.
- d) Tidur, malam melakukan perikatan, seseorang harus sadar ataupun sehat sepenuhnya, bila seseorang itu dalam keadaan tidur maka batal akad kontrak tersebut.
- e) Pingsan, sama dengan orang yang sedang tidur, seseorang yang sedang dalam keadaan pingsan tidak boleh melakukan akad, dikarenakan dirinya sedang tidak sadar.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Pers, Cet. Ke-3, 2009), h.33.

- f) Pemboros, seseorang dalam kriteria pemboros tidak bisa melakukan akad kontrak dikarenakan membahayakan dirinya dan para pihak yang melakukan akad, ditakutkan seseorang yang pemboros melakukan penyalahgunaan akad.
- g) Dunggu, seseorang yang berakad harus dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani, memiliki pikiran yang jernih dan dalam keadaan sadar, bila pelaku akad adalah orang yang dungu maka akanya tidak sah karena akan merugikan dirinya maupun para pihak yang berakad.
- h) Utang, orang yang terlalu banyak hutang akan membahayakan para pihak yang berakad, ditakutkan penyalahgunaan akad yang dilakukan oleh orang yang banyak hutang.

Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan dan dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek akad diperluas oleh Dr. Abd. Shomad, yaitu harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Halal menurut syara'

Suatu objek akad harus halal menurut agama islam dan bukan barang yang haram dan tidak melanggar syariat islam.

- b) Bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak)

Objek akad harus merupakan barang yang bermanfaat bagi para pihak dan bagi orang lain dan tujuannya bukan untuk merusak ataupun maengganggu orang.

c) Dimiliki sendiri atau atas kuasa pemilik

Kepemilikan objek akad harus suatu benda yang dimiliki dirinya sendiri, kepemilikan barang yang akan diadakan harus jelas dan benar milik para pihak yang berakad.

d) Dapat diserahkan (berada dalam kekuasaannya)

Suatu objek akad selain objek itu harus yang benar-benar dalam penguasaan pemiliknya dan bukan yang sedang digunakan oleh orang lain ataupun disewakan pemiliknya kepada orang lain.

e) Dengan harga yang jelas

Objek akad mempunyai harga yang jelas sesuai dengan kesepakatan antara pihak yang berakad.

Tujuan untuk memenuhi kehidupan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang akan mengadakan akad. Menurut ulama' fiqh tujuan suatu akad harus sesuai dengan kehendak syara', sehingga apabila tujuannya adalah bertentangan dengan syara' maka berakibat pada ketidakabsahan dari suatu perjanjian yang dibuat. Tujuan harus ada pada saat diadakan dapat berlangsung hingga berakhirnya akad dan harus dibenarkan oleh syara'.

Kesepakatan adalah kesepakatan melakukan pengikatan (*shighat al-aqd*). *Shighat al-aqd* adalah cara bagaimana pengikatan diri itu dilakukan. *Shighat al-aqd* biasanya diwujudkan dalam bentuk ijab qabul. Menurut Ahmad Azhar Basyir, *shighat al-aqd* dapat dilakukan dengan

cara lisan, tulisan atau isyarat yang member pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul dan dapat pula berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul.⁷ Syarat *shighat al-aqd* yaitu:

- a) *Jala'ul ma'na* (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya), sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- b) *Tawafuq* atau *tawafuqbainal ijab wal qabul* (persesuaian antara ijab dan qabul).
- c) *Jazmul iradatain* (ijab dan qabul mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti) tidak menunjukkan adanya unsur keragu-raguan atau paksaan.
- d) *Ittishal al-qabul bil ijab*, dimana kedua pihak dapat hadir dalam satu majelis.⁸

d. Syarat Akad

Setiap pembentuk akad atau akad syarat yang ditentukan syara' wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah:⁹

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak dibawah pengampunan (mahjur) karena boros atau lainnya.

⁷*Ibid.*, h. 68.

⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam Pernormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.182.

⁹ Hendi Suhendi,

- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melelukannya walaupun ia bukan aqid yang memiliki barang.
- 4) Akad tidak dilarang oleh syara'.
- 5) Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul, ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal.

e. Pembagian Akad

Akad dikategorikan menjadi beberapa bagian, diantaranya berdasarkan ketentuan valid dan tidak validnya, yaitu:

1) *Akad Shahih* (valid contract)

Akad shahih yaitu setiap akad yang menjadi sebab legal untuk melahirkan pengaruhnya dengan cara diucapkan oleh orang yang mempunyai wewenang sah hukumnya, selamat dari segala cacat dalam sifat dan rukunnya, atau dalam definisi yang lain *akad shahih* adalah setiap akad yang selamat dari segala aib dan menimbulkan akibat. Akad shahih di bagi menjadi dua, yaitu:¹⁰

- a) *Akad Shahih yang Nafiz*, yaitu setiap akad yang keluar dari orang yang memiliki legalits dan kuasa untuk mengeluarkannya, baik kuasa langsung atau melalui perwakilan seperti akad yang dibuat oleh seorang yang berakal dan bijak terhadap dirinya dalam

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalah Sistem Transaksi dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.20.

mengatur hartanya atau akad yang dibuat oleh pemberi wasiat atau wali kepada orang yang *naqis* (belum mumayyiz secara sempurna) atau diakadkan oleh orang yang mendapat perwakilan dari seseorang dengan cara yang sah. Hukumnya mempunyai pengaruh terhadap apa yang diakadkan tanpa harus menunggu kebenaran pembenaran dari seseorang.

- b) *Akad Shahih yang Mauquf*, yaitu setiap akad yang keluar dari pihak yang memiliki kemampuan untuk berakad namun tidak memiliki wewenang untuk melakukannya seperti akad yang keluar dari *fudhulli* (orang yang menyibukan dirinya dengan ya g tidak perlu atau dari anak kecil yang *mumayyiz* dan yang sama hukumnya jika akad tersebut tidak memerlukan pendapat wali atau pendapat wasiat). Hukumnya akad ini mempunyai pengaruh terhadap yang diakadkan kecuali jika dikeluarkan oleh orang yang memiliki hak yang sah, jika tidak maka akad ini batal seperti tidak pernah ada. *Akad shahih* berdasarkan dari segi wajib atau tidaknya dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- (1) *Akad lazim*, akad lazim adalah shahih yang nafiz (dilaksanakan secara langsung), satu pihak yang berakad tidak mempunyai hak *fasakh* (membatalkan dan melepaskannya). Akad ini terbagi kepada dua hal, yaitu akad lazim yang tidak bisa dibatalkan sama sekali walaupun kedua belah pihak sepakat

untuk membatalkannya, seperti akad nikah. Akad lazim yang bisa dibatalkan bila kedua belah pihak yang berakad berniat begitu seperti akad jual beli, sewa-menyewa, muzara'ah, musaqah dan shulhu (perdamaian).

(2) *Ghair lazim* (akad yang tidak lazim), akad khair lazim adalah akad yang mana kedua pihak memiliki hak untuk membatalkan dengan cara *fasakh* tanpa harus menunggu kerelaan pihak lain, seperti akad titip pinjaman dan hibah.

2) Akad yang tidak *shahih*

Akad yang tidak *shahih* yaitu akad yang terdapat kekurangan pada unsur dan syaratnya. Dengan demikian akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Jumhur Ulama' selain *Hanafiyah* menetapkan bahwa akad yang batal atau fasid termasuk golongan ini, sedangkan ulama' *hanafiyah* membedakan antara fasid dan batal.¹¹

Suatu akad dikatakan akad batal apabila terjadi pada orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat kecakapan atau objeknya tidak dapat menerima hukum akad hingga dengan demikian pada akad itu terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang syara'. Akad batal dipandang tidak pernah terjadi menurut hukum, meskipun secara material pernah terjadi yang oleh karenanya tidak mempunyai akibat hukum sama sekali.¹²

¹¹ Rahmat syafi'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.66.

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, ..., h. 114.

Adapun akad fasid adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat kecakapan terhadap objek yang dapat menerima hukum akad tetapi padanya ada hal-hal yang tidak dibenarkan syara'. Dalam hal ini kedua pihak dapat menerima fasakh.

Menurut fuqaha mazhab *Hanafi*, pembagian akad tidak sah menjadi akad batal dan rusak itu tidak berlaku untuk segala macam akad tetapi hanya dalam akad untuk memindahkan hak milik atau akad kebendaan yang mengakibatkan keajiban timbale balik antara pihak-pihak yang berakad. Adapun akad bukan kebendaan seperti perwakilan, dan sebagainya, demikian pula akad kebendaan yang tidak menimbulkan kewajiban timbale balik seperti pinjam meminjam, titipan dan sebagainya, demikian pula tindakan-tindakan sepihak seperti wakaf, pengakuan dan sebagainya, tidak dibedakan antara yang batal dan yang rusak.

f. Asas-Asas Hukum Perikatan Islam

Asas berasal dari bahasa Arab *Asasum* yang berarti basis, dasar dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip, yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak dan sebagainya. Mohamad Daud Ali mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah

kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berfikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.¹³

Ada beberapa asas kontrak (akad) yang berlaku dalam hukum perdata islam, asas-asas tersebut sangat berpengaruh pda pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh para pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas itu tidak terpenuhi dalam pelaksanaan suatu kontrak maka akan berakibat pada batalnya atau tidak sahnya kontrak yang dibuat.¹⁴ Beberapa asas tersebut yaitu:

1) Asas Ilahiah

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Kegiatan muamalat termasuk perbuatan perikatan, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan, dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada Allah SWT. Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Akibatnya, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

¹³ Gemala Dewi, et. al, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Jakarta, 2013), h.30.

¹⁴ Saiful Jazil, *Fikih Muamalah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2014),h.65.

2) Asas Kebebasan (*al-hurriyah*)

Menurut Fathurahman Djamali, asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan merupakan prinsip dasar pula dari hukum perjanjian. Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan, bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya, namun kebebasan ini tidaklah absolute. Sepanjang tidak bertentangan dengan syaria Islam maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan.

Syariat Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan apa yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama, tujuannya adalah untuk menjaga agar tidak terjadi penganiyayan sesama manusia melalui akad dan syarat-syarat yang dibuat. Asas ini juga menghindari semua bentuk tekanan, paksaan dan penipuan dari pihak manapun. Adanya unsur pemaksaan dan pemasungan kebebasan bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.

3) Asas Persamaan atau Kesetaraan

Suatu perbuatan muamalat merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, antara sesama manusia masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, untuk itu antara manusia satu dengan yang lainnya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan perikatan ini para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini, tidak boleh ada kedzaliman yang dilakukn dalam perikatan tersebut.

4) Asas Keadilan (*Al- 'Adalah*)

Pelaksanaan asas ini dalam akad dimana para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah dibuat dan memenuhi semua kewajibannya. Asas ini berkaitan erat dengan asas kesamaan, meskipun keduanya tidak sama dan merupakan lawan dri kedzaliman. Salah bentuk kedzaliman adalah mencabut hak-hak kemerdekaan orang lain dan atau tidak memenuhi kewajiban terhadap akad yang dibuat.

5) Asas Kerelaan (*al-Ridha*)

Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan pada kerelaan semua pihak yang membuatnya.

Kerelaan para pihak yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang Islami, dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak asas ini tidak terpenuhi, maka kontrak yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil. Kontrak yang dilakukan itu tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk usaha yang dilandasi saling rela antara pelakunya jika didalamnya terdapat unsur tekanan, penipuan dan paksaan atau ketidak jujuran dalam pernyataan.

6) Asas Kejujuran (*Ash-Shidiq*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.

7) Asas Tertulis (*al-Kitabah*)

Asas ini menyatakan bahwa setiap akad hendaknya dibuat secara tertulis, hal ini berkaitan dengan keperluan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Didalam Islam ketika seseorang subjek hukum hendak membuat suatu akad dengan subjek hukum lainnya selain harus didasari dengan kata sepakat ternyata juga dianjurkan untuk dituangkan kedalam bentuk tertulis dan juga diperlukan kehadiran saksi-saksi, hal demikian sangatlah penting

terutama sekali untuk akad-akad yang membutuhkan pengaturan yang kompleks.

g. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunua, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditangguhkan). Akad dengan pembatalan terkadang dihilangkan dari asalnya seperti pada masa *khiyar*, terkadang dihilangkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan sewa-menyewa dan pinjam meminjam yang telah disepakati selama lima bulan tetapi belum sampai lima bulan, telah dibatalkan pada akad *ghairlazim*. Yang kedua pihak dapat membatalkan akad, pembatalan ini sangat jelas seperti pada penitipan barang, perwakilan dan lain-lain, atau yang *ghair lazim* pada satu pihak, dan *lazim* pada pihak lainnya seperti gadai. Orang yang menerima gadai dibolehkan membatalkan akad walaupun tanpa sepengetahuan orang yang menggadaikan barang.

Adapun pembatalan pada akad *lazim* terjadi ketika akad rusak, adanya *khiar*, pembatalan akad, tidak mungkin melakukan akad dan masa akad berakhir.¹⁵

2. Perjanjian Menurut Hukum Positif

a. Pengertian Perjanjian dalam Hukum Positif

Perjanjian diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perikatan yang sifatnya terbuka. Kata

¹⁵ Rahmat Syafi'I, *Fikih Muamalah*, ..., h.70.

perikatan mempunyai arti yang lebih luas dari kata perjanjian, sebab kata perikatan tidak hanya mengandung pengertian hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari undang-undang. Untuk memberikan definisi terhadap suatu hal tidak mudah, akan tetapi banyak para ahli yang memberikan pendapatnya tentang definisi perikatan yang berbeda-beda.¹⁶

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi.¹⁷

Hubungan antara perikatan dengan perjanjian dapat dirumuskan, bahwa perjanjian merupakan sumber utama dari suatu perikatan, sehingga perikatan itu ada bilamana terdapat suatu perjanjian. Dengan demikian, antara perjanjian dan perikatan terdapat hubungan sebab akibat, yaitu perjanjian sebagai sebab yang merupakan suatu peristiwa hukum, sedangkan perikatan sebagai akibat hukumnya.¹⁸

Salah satu definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1998), h.1.

¹⁷ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Jakarta: Bina Cipta, 1988), h.3.

¹⁸ Purwahid Patrick, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), h.9.

melakukan sesuatu. Perjanjian adalah sebagai perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal dengan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), diatur dalam pasal 1313 yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁹

Dari semua definisi perjanjian yang diterangkan diatas, terlihat bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan baik secara lisan maupun tertulis. Dari hubungan ini timbul suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya. Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah, perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan disamping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan dengan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan dua kata tadi adalah sama, yaitu perjanjian dan persetujuan.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan maupun secara tertulis. Ketentuan ini dapat dibuat lisan atau tertulis lebih kepada bersifat sebagai alat bukti semata apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang

¹⁹ Widjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Bale Bandung, 1986), h.20.

membuat perjanjian. Tetapi ada beberapa perjanjian yang ditentukan bentuknya oleh peraturan perundang-undangan, dan apabila bentuk ininitidak dipenuhi maka perjanjian tersebut menjadi batal atau tidak sah.

b. Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Mengikat atau tidak mengikatnya suatu kontrak kerja terhadap para pihak yang membuatnya tergantung kepada sah atau tidaknya kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut. Sah atau tidaknya suatu kontrak dapat dipastikan dengan mengujinya menggunakan instrument hukum yang terkongkritisasi dalam wujud syarat-syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur secara sistematis dalam buku III KUHPerdato, yaitu:

- 1) Syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato;
- 2) Syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur diluar Pasal 1320 KUHPerdato.²⁰

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat-syarat sah yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdato, yaitu:

- 1) Kesepakatan atau Persetujuan Para Pihak;

Sepakat yang dimaksudkan bahwa subjek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari

²⁰ Muhammad Syaifudin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Prspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, (Bandung: Mondar Maju, 2016), h.109.

perjanjian yang diadakan, apa yang dikehendaki oleh pihak yang setuju, juga dikehendaki oleh para pihak lain.

2) Kecakapan Para Pihak dalam Membuat Suatu Perjanjian;

Orang yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Menurut Pasal 1330 KUHPerdara No.330 KUHPerdara, yang dimaksud cakap menurut hukum adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi sudah kawin.

3) Suatu Hal Tertentu;

Suatu hal tertentu maksudnya adalah sudah ditentukan macam atau jenis, benda atau barang dalam perjanjian itu. Mengenai barang itu sudah ada atau sudah berada ditangan pihak yang berkepentingan pada waktu perjanjian dibuat tidak diharuskan oleh undang-undang dan juga mengenai jumlah tidak perlu untuk disebutkan.

4) Suatu Sebab yang Halal;

Terkait dengan pengertian sebab yang halal, beberapa sarjana mengajukan pemikirannya, seperti H.F.A. Vollmar dan Wirjono Prodjodikoro yang memberikan pengertian sebab (kausa) sebagai maksud atau tujuan dari perjanjian. Sedangkan Subekti menyatakan bahwa sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian kausa

merupakan prestasi dan kontrak prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak.²¹

Selain yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, terdapat syarat lain yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian, diantaranya Pasal 1338 (ayat 3) dan 1339 KUHPerdara, yaitu:²²

- 1) Perjanjian dilakukan dengan itikad baik
- 2) Perjanjian mengikat sesuai kepatutan
- 3) Perjanjian mengikat sesuai kebiasaan
- 4) Perjanjian harus sesuai dengan undang-undang (hanya terhadap yang bersifat hukum memaksa)
- 5) Perjanjian harus sesuai dengan ketertiban umum.

c. Asas-Asas perjanjian

1) Asas Konsensualitas

Perjanjian itu lahir atau timbul, berlaku sejak saat tercapainya kata sepakat diantara para pihak tanpa perlu adanya formalitas tertentu. Asas ini disimpulkan dari kata “perjanjian yang dibuat secara sah”, dalam pasal 1338 ayat (1) pasal 1320 angka (1) KUHPerdara. Oleh karena itu dalam pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu disamping kesepakatan yang telah tercapai maka dpt disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudah sah dalam arti mengikat

²¹ Agus Yudha Harnoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h.194.

²² Munir Fuadi, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.185.

para pihak, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok atau hal-hal yang menjadi objek perjanjian itu. Dalam membuat kontrak pada umumnya para pihak tidak terikat pada bentuk tertentu. Kontrak dapat dibuat secara lisan ataupun tertulis, bentuk tertulis secara yuridis hanya dimaksudkan untuk alat bukti tentang terjadinya perjanjian tersebut.²³

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan otonomi para pihak sebagai penjabaran dari buku III KUHPerdata yang menganut sistem terbuka (*optional law*). Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.²⁴ Dengan menekankan pada kata “semua” maka pasal ini seolah-olah berisikan suatu pernyataan pada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya sebagai undang-undang.

Menurut Sutan Remi Sjahdeini asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:²⁵

²³ *Ibid*, h.187.

²⁴ Muhammad Noor, “Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan dalam Pembuatan Kontrak”, *Mazahib*, No.1 Vol XIV (Juni 2015), h.90.

²⁵ Wiwoho, *Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Penaku, 2017), h.160.

- a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- b) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian
- c) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kuasa dari perjanjian yang akan dibuatnya
- d) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
- e) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
- f) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

3) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini dapat disimpulkan dari kata “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Para pihak harus mematuhi dan menghormati perjanjian yang dibuatnya karena perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi kedua pihak. Hal ini dikuatkan oleh pasal 1338 ayat (2) “perjanjian-perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”, asas ini sering disebut dengan asas kepatian hukum.²⁶

²⁶*Ibid*, h.80.

4) Asas Itikad Baik

Asas ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian, asas itikad baik ini terdapat pada pasal 1338 ayat (3) KUHPdata yang menentukan “persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Ketentuan pasal 1338 ayat (3) KUHPdata juga memberikan kekuasaan pada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan dan keadilan.²⁷

Itikad baik dapat dibedakan dalam pengertian subjektif dan objektif. Itikad baik dalam segi subjektif berarti kejujuran, hal ini berkaitan erat dengan sikap batin seseorang pada saat membuat perjanjian. Itikad baik dari segi objektif berarti kepatutan, yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan prestasi dan cara melaksanakan hak dan kewajiban haruslah mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Dalam hukum kontrak, itikad baik memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi standar, fungsi menambah dan fungsi membatasi. Fungsi standar berarti semua kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik. Fungsi menambah berarti hakim dapat menambah isi perjanjian dan menambah kata-kata peraturan perundang-undangan yang berkaitan

²⁷ Otto Cornelis Kaligis, *Kontrak Bisnis Teori dan Praktik* Jilid 1, (Bandung: PT. Alumni, 2013), h.6.

dengan perjanjian itu. Fungsi embatasi dan meniadakan berarti hakim dapat mengkesampingkan isi perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian jika terjadi perubahan keadaan yang dapat mengakibatkan ketidakadilan.²⁸

5) Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas bermakna sebagai asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual.²⁹ Asas proporsionalitas sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak.

- a) Dalam tahap pra-kontrak asas proporsionalitas membuka peluang negosiasi bagi para pihak untuk melakukan pertukaran hak dan kewajiban secara *fair*. Oleh karena itu tidak proporsional dan harus ditolak proses negosiasi dengan itikad buruk.
- b) Dalam pembentukan kontrak asas proporsionalitas menjamin kesetaraan hak serta kebebasan dalam menentukan atau mengatur proporsi hak dan kewajiban para pihak berlangsung secara *fair*.
- c) Dalam pelaksanaan kontrak asas proporsionalitas menjamin terwujudnya distribusi peraturan hak dan kewajiban menurut porsi yang disepakati atau dibebankan pada para pihak.

²⁸ Muhamad Noor, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan dan Pembuatan Kontrak", ..., h.92.

²⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas*, ..., h.87.

- d) Dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kontrak, maka harus dinilai secara proporsional apakah kegagalan tersebut bersifat fundamental sehingga mengganggu pelaksanaan sebagian besar kontrak atau sekedar hal-hal yang sederhana/kesalahan kecil.
- e) Dalam hal terjadinya sengketa kontrak, asas proporsionalitas menekankan bahwa proporsi beban pembuktian kepada para pihak harus dibagi menurut pertimbangan yang *fair*.

Asas proporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil secara matematis namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban diantara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut.³⁰

Pada dasarnya, sahnya suatu perjanjian dibuat berdasarkan syarat-syarat sebagaimana dalam pasal 1320 KUHPdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat-syarat perjanjian sebagai mana tersebut diatas meliputi syarat subjektif dan syarat objektif, apabila perjanjian tidak sesuai dengan syarat subjektif pada angka 1 dan angka 2, maka perjanjian tersebut dapat

³⁰*Ibid*, h.90.

dibatalkan. dan apabila perjanjian tidak sesuai dengan syarat obyektif pada angka 3 dan 4, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), mengatur mengenai akibat hukum terhadap perjanjian kerja yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja dibuat atas dasar:

1. Kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya pekerjaan yang dipekerjakan;

Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagai mana dimaksud pada pasal 52 ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan, sedangkan perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.

Pengertian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).

Sedangkan pengertian batal demi hukum (*Null and Void*) adalah dari awal perjanjian itu telah batal, atau dianggap tidak pernah ada, apabila syarat obyektif tidak dipenuhi. Perjanjian kerja itu batal demi hukum, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan/atau tidak pernah ada suatu perikatan. Dalam pasal 1265 KUH Perdata, syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian.

B. Kontrak Kerja Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Kontrak Kerja dalam Islam (*Al-Ijarah*)

a. Pengertian Kontrak Kerja

Kontrak kerja dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Ijarah* artinya upah, sewa, jasa atau imbalan. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain-lain.³¹

Al-Ijarah berasal dari kata *al ajru* yang berarti *al 'Iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah). Menurut pengertian *syara'*, *Al-Ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Manfaat terkadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dinaiki (dikendarai). terkadang juga berbentuk karya, seperti karya seorang insinyur pekerja

³¹ M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalah (Berbagai Macam Transaksi dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.228.

bangunan, tukang tenun, penjahit dan lain-lain. Terkadang manfaat itu berbentuk sebagai kerja pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga. Pemilik yang memberikan manfaat disebut *mu'ajjir* (orang yang menyewakan), pihak lain yang member sewa disebut *musta'jir* (orang yang menyewa/penyewa), dan sesuatu yang diadakan untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan), sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ajran/ujrah* (upah). Manakala akad sewa-menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat, dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah, karna akad ini adalah *mu'awadah* (penggantian).³²

b. Rukun *Ijarah*

Rukun adalah kata mufrad dari kata jama' "Arkan" artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sah (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.³³ Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, rukun ijarah ada tiga, yaitu: *sighat* (ijab dan qabul), pihak-pihak yang berakad

³² Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah* juz 13, Terj. Kamaludin A. Marzuki (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988), h.30.

³³ M. Abdul Mujieb, et. al. *Kamus Istilah Fikih*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h.300.

(baik verbal maupun dalam bentuk lain), dan objek (manfaat barang dan sewa, atau manfaat jasa dan upah).³⁴

Rukun ijarah menurut jumhur ulama' ada tiga, yaitu: *aqidan* yang terdiri dari *mu'ajir* dan *musta'jir*, *ma'qud* 'alaih terdiri dari ujah dan manfaat, dan *sighat* yang terdiri dari ijab dan qabul. Rukun dan syarat ijarah adalah sebagai berikut:

1) Rukun-Rukun Ijarah

- a) *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta) dan saling meridhai.

Allah SWT Berfirman: Q.S. An-Nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,

³⁴ Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.89.

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa’: 29).³⁵

Bagi orang yang berakad ijarah juga disyariatkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

b) *Sighat* (ijab dan qabul)

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbale balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Dari pengertian tersebut ijab qabul terjadi antara dua pihak dengan sukarela, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik.³⁶

c) *Ujrah* (upah), disyatratkan diketui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun upah mengupah.

³⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2016), h.226.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, ..., h.117.

d) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat, yaitu:³⁷

- (1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah, dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- (2) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja beserta kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- (3) Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- (4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat-nya) hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

c. Syarat *Ijarah*

Untuk sahnya sewa-menyewa (*ijarah*) yang harus dilihat terlebih dahulu adalah orang yang akan melakukan perjanjian sewa-menyewa, yaitu apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya.

Unsur yang terpenting untuk diperhatikan yaitu kedua pihak cakap bertindak dalam hukum, yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk. *Imam Syafi'I* dan *Imam Hambali*

³⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), h.131.

menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa (baligh). Perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka tidak sah, walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (berakal).³⁸

Sedangkan menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi dalam buku Hukum Perjanjian dalam Islam menjelaskan bahwa untuk sahnya perjanjian sewa-menyewa (ijarah) harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁹

- 1) Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa, maksudnya kalau didalam perjanjian sewa-menyewa itu terdapat unsur paksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah.
- 2) Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu masa sewa-menyewa berlangsung dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan).
- 3) Objek sewa menyewa dapat digunakan sesuai sesuai peruntukannya, maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaannya) barang tersebut, adanya barang itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan maka perjanjian sewa-

³⁸ Muhamad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, (t.tt: Lentera, 1999), h.685.

³⁹ Chairuman Pasaribu, Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.53-55.

menyewa itu dapat dibatalkan. Dalam hal kontrak kerja dapat diartikan hasil suatu pekerjaan yang telah dikerjakan itu sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya, sehingga pengusaha merasa tidak dirugikan.

- 4) Objek sewa-menyewa dapat diserahkan, maksudnya barang yang diperjanjikan dalam sewa-menyewa harus dapat di serahkan sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam hal kontrak kerja dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan tersebut harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara kedua pihak.
- 5) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama. Perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan dalam ketentuan hukum agama tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Dalam hal kontrak kerja, misalnya orang menyewakan seseorang untuk membunuh seseorang secara aniaya, itu akan menjadikan ijarah batal, karena upah yang diberikan adalah penggantian dari yang diharamkan dan masuk dalam kategori memakan uang hasil dari pekerjaan yang dilarang oleh agama.

d. Jenis-Jenis *Ijarah*

Akad ijarah diklasifikasikan menurut objeknya menjadi dua macam, yaitu ijarah terhadap manfaat benda-benda nyata yang dapat diindra dan ijarah terhadap jasa pekerjaan. Jika pada jenis pertama ijarah bisa dianggap terlaksana dengan penyerahan barang yang disewa kepada

penyewa untuk dimanfaatkan, seperti menyerahkan rumah, kendaraan, toko, pakaian, perhiasan dan sebagainya untuk dimanfaatkan penyewa. Pada jenis kedua, ijarah baru bisa dianggap terlaksana kalau pihak yang disewa (pekerja) melaksanakan tanggung jawabnya melakukan sesuatu, seperti membuat rumah yang dilakukan tukang, memperbaiki televisi kepada tukang servis tv dan sebagainya. Dengan diserahkannya barang dan dilaksanakannya pekerjaan tersebut, pihak yang menyewakan dan pihak pekerja baru berhak mendapatkan uang sewa dan upah.

Pada jasa tenaga kerja disyaratkan kejelasan karakteristik jasa yang diadakan. Sedangkan pada jasa barang, selain persyaratan yang sama juga disyaratkan bisa dilihat (dihadirkan) pada waktu akad dilangsungkan, sama seperti persyaratan barang yang diperjual belikan. Pada ijarah tenaga kerja berlaku hukum harga atau upah, pada ijarah benda berlaku hukum jual beli. Terdapat berbagai jenis ijarah, yaitu *ijarah 'amal*, *ijarah 'ain/ijarah muthlaqah*, *ijarah muntahiya bittamlik* dan *ijarah multi jasa*.⁴⁰

1) *Ijarah 'Amal*

Ijarah 'amal digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut *musta'jir* dan pekerja disebut *ajir*, dan upah yang di bayarkan kepada *ajir* disebut *ujrah*. Dalam bahasa inggris, *ujrah* adalah fee.

⁴⁰ Fathurahman Djamili, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.154.

2) *Ijarah 'Ain atau Ijarah Muthlaqah* (ijarah murni)

Ijarah 'ain adalah jenis ijarah yang terkait dengan penyewaan asset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari asset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari asset itu, dengan kata lain yang dipindahkan hanya manfaat (*usufruct*). Ijarah 'ain dalam bahasa Inggris adalah *term lessing*. Dalam hal ini pemberi sewa disebut *mu'jir* dan penyewa adalah *musta'jir* dan harga untuk memperoleh manfaat tersebut disebut *ujrah*.

Akad ijarah 'ain tidak terdapat klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli asset tersebut selama masa sewanya atau diakhir masa sewanya. Pada ijarah 'ain yang menjadi objek akad sewa-menyewanya adalah barang.

3) *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Ijarah muntahiya bittamlik disebut juga dengan *ijarah wa iqtina*, yaitu perjanjian sewa-menyewa antara pihak pemilik asset tetap (lessor) dan penyewa (lessee), atas barang yang disewakan penyewa mendapat hak opsi untuk membeli objek sewa pada saat masa sewa berakhir.

Ijarah muntahiya bittamlik dalam perbankan dikenal dengan *financial lease*, yaitu gabungan antara transaksi sewa dan jual beli, karena pada akhir masa sewa, penyewa diberi hak opsi untuk membeli objek sewa. Pada akhir masa sewa objek sewa akan berubah dari milik lessor menjadi

milik lesse.⁴¹ Dalam ijarah muntahiya bittamlik, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara sebagai berikut:

- a) Pihak yang menyewa berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.
- b) Pihak yang menyewa berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.

Pilihan untuk menjual barang di akhir masa sewa biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relative kecil, maka akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai akhir periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Untuk menutupi kekurangan tersebut, bila pihak penyewa ingin memiliki barang maka ia harus membeli barang itu di akhir periode.

Pilihan menghibahkan barang di akhir masa sewa biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif besar. Karena sewa yang dibayarkan lebih besar maka akumulasi sewa di akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Dengan demikian bank dapat

⁴¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pustaka Media Group, 2011), h.162.

menghibahkan barang tersebut diakhir masa periode sewa kepada pihak penyewa.⁴²

e. Hal-hal yang Membatalkan *Ijarah*

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa (*ijarah*) merupakan perjanjian yang lazim, dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak pasakh), karena jenis perjanjian termasuk pada perjanjian timbal balik. Bahkan jika salah satu pihak (yang menyewakan atau penyewa) meninggal dunia perjanjian sewa-menyewa tidak akan menjadi batal, asalkan saja yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa masih tetap ada, sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia maka kedudukannya diganti oleh ahli waris, apakah dia sebagai pihak yang menyewakan ataupun juga sebagai pihak penyewa.⁴³

Yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa-menyewa (*Ijarah*) adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut:⁴⁴

1) Terdapat cacat pada barang yang disewa

Maksudnya barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada ditangan pihak penyewa yang mana kerusakan ini diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri.

⁴² Adi Warman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.150.

⁴³ Chairuman Pasaribu, Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam, ...*, h.58.

⁴⁴ *Ibid.*, h.58-59.

Dalam hal pekerjaan ini dapat diartikan bahwa seorang pekerja lalai dalam melakukan pekerjaan, sehingga fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk bekerja mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh pekerja itu sendiri.

2) Rusaknya barang yang disewakan

Maksudnya barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Dalam hal kontrak kerja dapat diartikan bahwa seorang pekerja mendapatkan suatu pekerjaan yang telah dijanjikan sebelumnya. Misalnya seorang sopir dijanjikan akan mendapatkan mobil yang bagus tetapi kenyataannya mendapatkan mobil yang rusak, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

3) Rusaknya barang yang diupahkan

Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadinya sewa-menyewa mengalami kerusakan, karena dengan kerusakan atau musnahnya barang tersebut, maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi.

Dalam hal kontrak kerja dapat diartikan bahwa seorang pengusaha akan mengakhiri perjanjian apabila hasil karya seseorang pekerja mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan

Maksudnya apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa-menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak.

Dalam hal kontrak kerja, dapat diartikan bahwa bila masa perjanjian tersebut telah habis maka perjanjian dipandang telah berakhir dan tidak berlaku lagi untuk masa berikutnya sebelum melakukan perjanjian baru lagi.

5) Adanya Udzur

Maksudnya adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya seorang pekerja telah mengikatkan dirinya kepada pengusaha untuk bekerja tetapi setelah waktu pelaksanaan pabrik tersebut ternyata belum bisa dipergunakan maka pekerja dapat membatalkan perjanjian tersebut.

Adanya kebolehan *memfasakh* ijarah, karena adanya udzur ini disepakati oleh para penganut mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa “boleh memfasakh ijarah, karena adanya udzur sekalipun dari salah satu pihak”.⁴⁵

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah* juz 13, ..., h.30.

2. Kontrak Kerja Menurut Hukum Positif

Al-Ijarah (kontrak kerja) ini sering sering juga diistilahkan dengan perjanjian untuk melakukan pekerjaan dan lazim juga digunakan istilah perjanjian perburuhan.⁴⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan bahwa perjanjian kerja adalah dimana pihak kesatu yaitu buruh, mengikatkan dirinya untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan selama waktu tertentu, untuk melakukan pekerjaan dengan menerima upah.⁴⁷

Perkembangan hukum perburuhan dan ketenagakerjaan mengalami perubahan yang menuju kearah perbaikan, yakni dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang disebutkan dalam pasal 1 angka (2) bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat.

Pengertian tenagakerja dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tersebut menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam pasal 1 Undang-Undang No. 14 tahun 1964 tentang Pokok Ketenagakerjaan yang memberikan pengertian, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁴⁸

⁴⁶ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, ..., h.122.

⁴⁷ Ninik Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.382.

⁴⁸ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 1987), h.5.

Sebelum waktu kerja dimulai, terlebih dahulu pekerja atau karyawan membuat perjanjian kerja baik tertulis maupun tidak tertulis. Menurut KUHPdata seperti diatas tampak bahwa ciri khas perjanjian adalah dibawah pemeritahan pihak lain, dibawah perintah ini menunjukan bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha adalah hubungan bawahan dan atasan. Pengusaha sebagai pihak yang lebih tinggi secuera sosial-ekonomi memberikan perintah pekerja yang secara sosial-ekonomi mempunyai kedudukan yang lebih rendah untuk melakukan pekerjaan tertentu. Adanya wewenang perintah inilah yang membedakan antara perjanjian kerja dengan perjanjian lainnya.

Pengertian perjanjian kerja menurut Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sifatnya lebih umum, karena menunjuk pada hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja menurut Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ini tidak menyebutkan bentuk perjanjian kerja itu lisan atau tertulis, demikian juga menurut jangka waktunya ditentukan atau tidak sebagaimana sebelumnya diatur dalam undang-undang No 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan.

Waktu kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari dan atau malam hari. Mengenai waktu kerja diatur dalam pasal 77 dan 78 Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu:⁴⁹

Pasal 77 yang berbunyi:

- (1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja
- (2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
 - b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Ketentuan waktu kerja sebagai mana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
- (4) Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan keputusan menteri.

Pasal 78 yang berbunyi:⁵⁰

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan buruh/pekerja melebihi waktu kerja sebagai mana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:
 - a. Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, h.344

⁵⁰ Undang-Undang RI. NO.13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, Pasal 77 dan Pasal 78.

- b. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.
- (3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerja tertentu.
- (4) Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan keputusan menteri.

Pada kedua sistem jam kerja tersebut juga diberikan batasan jam kerja yaitu 40 jam dalam satu minggu, apabila melebihi dari ketentuan waktu kerja tersebut, maka waktu kerja bisa dianggap masuk sebagai waktu kerja lembur sehingga pekerja/buruh berhak atas upah lembur.

C. Beban Kerja

1. Pengertian Beban Kerja

Menurut Dadang Sunyoto, beban kerja adalah beban kerja yang terlalu banyak dapat menyebabkan ketegangan dalam diri seseorang sehingga menimbulkan stress, hal ini bisa disebabkan oleh tingat keahlian yang dituntut terlalu tinggi, kecepatan kerja mungkin terlalu tinggi, kecepatan kerja mungkin terlalu tinggi, volume kerja mungkin terlalu banyak dan sebagainya.

Menurut Arika (2011), tubuh manusia dirancang untuk dapat melakukan aktivitas pekerjaan sehari. Adanya massa otot yang bobotnya hampir lebih dari separuh beban tubuh, memungkinkan kita untuk dapat menggerakkan dan melakukan pekerjaan. Pekerjaan disatu pihak mempunyai arti penting bagi kemajuan dan peningkatan prestasi, sehingga mencapai kehidupan yang produktif sebagai satu tujuan hidup.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa beban kerja adalah banyaknya tuntutan kerja dan target kerja yang harus diselesaikan yang menyebabkan ketegangan dalam diri seseorang sehingga menimbulkan stress. Menurut Soleman (2011:85) secara umum hubungan antara beban dan kapasitas kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sangat kompleks, baik faktor internal maupun eksternal.

Faktor eksternal beban kerja adalah beban kerja yang berasal dari luar tubuh pekerja, yaitu meliputi:

- a. Tugas (*task*) meliputi tugas bersifat fisik seperti, stasiun kerja, tata ruang tempat kerja, kondisi lingkungan kerja, sikap kerja, beban yang diangkat. Sedangkan tugas yang bersifat mental meliputi tanggung jawab, kompleksitas pekerjaan, emosi pekerja, tingkat kerja dan kesulitan kerja.
- b. Organisasi kerja, organisasi kerja meliputi lamanya waktu kerja, waktu istirahat, shift kerja, sistem kerjadan sebagainya.

- c. Lingkungan kerja, lingkungan kerja ini dapat memberikan beban tambahan yang meliputi, lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja kimiawi, lingkungan kerja biologis dan lingkungan kerja psikologis.

Menurut Manuba (2000:4) beban kerja yang terlalu berlebihan akan menimbulkan efek berupa kelelahan baik fisik maupun mental dan reaksi-reaksi seperti sakit kepala, gangguan pencernaan dan mudah marah. Sedangkan pada beban kerja yang terlalu sedikit dimana pekerjaan yang terjadi karena pengurangan gerak akan menimbulkan kebosanan dan rasa monoton. Kebosanan dalam kerja rutin sehari-hari karena tugas atau pekerjaan yang terlalu sedikit mengakibatkan kurangnya perhatian pada pekerjaan sehingga secara potensial membahayakan dan menurunkan kinerja karyawan. Bertambahnya target yang harus dicapai perusahaan, bertambah pula beban kerja karyawan. Apabila beban kerja terus menerus bertambah tanpa adanya pembagian beban kerja yang sesuai maka kinerja karyawan akan menurun.

2. Indikator Beban Kerja

Menurut Putra (2012:22), indikator beban kerja meliputi:

- a. Target Yang Harus Dicapai

Pandangan individu mengenai besarnya target kerja yang diberikan untuk menyelesaikan pekerjaannya, misalnya mendapatkan nasabah dan pendapat omset perusahaan yang telah ditetapkan. Pandangan mengenai hasil kerja yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

b. Kondisi Pekerjaan

Mencakup tentang bagaimana pandangan yang dimiliki oleh individu mengenai kondisi pekerjaannya, seperti mengatasi kejadian yang tak terduga seperti harus bekerja diluar jam kerja untuk mendatangi nasabah dan menyelesaikan pekerjaan lainnya.

c. Standar Pekerjaan

Kesan yang dimiliki oleh individu mengenai pekerjaannya, misalnya perasaan yang timbul mengenai beban kerja yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan atau tidak ditentukan.

3. Efek Beban Kerja

Menurut Manuba (2000:4) beban kerja yang terlalu berlebihan akan menimbulkan efek berupa kelelahan baik fisik maupun mental dan reaksi-reaksi seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, dan mudah marah. Sedangkan pada beban kerja yang terlalu sedikit dimana pekerjaan yang terjadi karena pengurangan gerak akan menimbulkan kebosanan dan rasa monoton. Bertambahnya target yang harus dicapai perusahaan, bertambah pula beban kerja karyawan. Menurut Setyawan dan Kuswati (2006:109) apabila beban kerja terus menerus bertambah tanpa adanya pembagian beban kerja yang sesuai maka kinerja karyawan akan menurun.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian secara khusus tentang Penambahan Beban Pekerjaan di Luar Kontrak Kerja di Perumahan Permata Biru Sukarame Bandar Lampung sejauh ini belum pernah dilakukan. Termasuk penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penambahan Beban Pekerjaan di Luar Kontrak Kerja” sebelumnya belum pernah ada. untuk mengetahui persamaan dan perbedaan permasalahan skripsi yang sudah pernah ditulis sebelumnya bisa dilihat dari pokok permasalahan terlebih dahulu, berikut penjelasannya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dita Fauzia (1121030031) Mahasiswi S1 Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perjanjian Kerja Antara Majikan dan Pembantu Rumah Tangga (Studi di Kelurahan Sukabumi Sukarame Bandar Lampung)”.⁵¹

- a. Rumusan Masalah

Bagaimana praktek perjanjian kerja serta analisis hukum Islam dan Hukum Positif tentang pelaksanaan perjanjian kerja antara ajikan dan pembantu rumah tangga di Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung?

- b. Tujuan Penelitian

Ingin mengetahui dan menganalisis praktek perjanjian kerja antara majikan dan pembantu rumah tangga dan menganalisis pandangan huku Islam dan

⁵¹ Dita Fauzia, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perjanjian Kerja Antara Majikan dan Pembantu Rumah Tangga*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015.

hukum positif tentang pelaksanaan perjanjian kerja antara majikan dan pembantu rumah tangga di Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung.

Pokok permasalahannya yaitu praktek perjanjian kerja antara majikan dan pekerja hanya dilakukan secara lisan dan hanya berdasarkan kepercayaan, sehingga membuat ketidakseimbangan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan rasa ketidakadilan para pekerja dari perlakuan majikan yang semena-mena.

2. Skripsi yang ditulis oleh Annisa Amala (1321030037) Mahasiswi S1 Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Outsourcing (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)”⁵²

- a. Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja *outsourcing* menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta apa persamaan dan perbedaannya.

- b. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja *outsourcing* menurut hukum Islam dan Undang-

⁵² Annisa Amala, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Outsourcing*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018.

Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan untuk mengetahui apa persamaan dan perbedaannya.

Pokok permasalahannya yaitu karena banyaknya para pihak yang menganggap dengan adanya sistem *outsourcing* tidak memberikan rasa keadilan terutama terhadap perlindungan hak-hak dasar yang seharusnya didapat oleh mereka selaku tenaga kerja *outsourcing*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'anul Karim

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: PT. Diponegoro, 2014.

B. Buku

Azzam Muhammad, *Fiqih Muamalah*,. Jakarta: Amzah, 2010.

Al-Quruby, Usman. *Al-Qur'an Cordoba*. Bandung:Cordoba Internasional,2016.

Asyhadi Zaeni, *Hukum Kerja*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.

Azzam, Abdul Aziz Muhamad, *Fikih Muamalah: Sistem ataransaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perikatan Indonesia)*, Yogyakarta: UII pers, 2009.

Chairuman Pasaribu dan Suharwadi k. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Dewi Gemala et.al, *Hukum Perjanjian Kerja di Indonesia*, Jakarta: Kencana Jakarta, 2013.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke Empat, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Djamali Fathurahman, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Fu'adi Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Hernoko, Agus Yuda, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Pernada Media Group, 2014.

Husni Lalu, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Hasan Ali, *Fikih Muamalah: Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Huda Nur, *Fiqih Muamalah*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2010.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Permata Media Group, 2011.

Jazil Syaiful, *Fikih Muamalah*, Surabaya: Risalah Gusti, 2014.

Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: Mondar Maju, 1996.

Karim Adi Warman, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Kaligis, Otto Cornelis, *Kontrak Bisnis Teori dan Praktek, Jilid I*, Bandung: PT. Alumni, 2013.

-----, *Pengantar Metode Riset*, Bandung:Alumni Bandung, 1986.

Lubus Suharwardi K. *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta:Sinar Grafika, 2014.

Mujieb, M. Abdul et.al, *Kamus Istilah Fiqih, Cet. Ke-3*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Manang Sungatji, Etta dan Sopiah, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: C.V Andi, 2010.

Mughniyah, Muhamad Jawad, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 1999.

Mas'adi, Gufron A., *Fikih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Noor Juliansyah, *Metodologi dan Penelitian:Skripsi,Tesis,Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta:Kencana, 2011.

Patrick Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mondar Maju, 1994.

Prodjodikoro Widjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Bale Bandung, 1991.

Rozainda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1998.

Shomad Abdul, *Hukum Islam Pernormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.

Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta: Bina Cipta.

Syaifudin Muhamad, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mondar Maju, 2016.

Syarifuddin Amir. *Ushul Fiqih, Jilid I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah Juz.13, Terjemah: Kamaludin A. Marzuki*, Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1998.

Syafi'I Rahmad, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

-----, *Fiqih Muamalah*, Cet. Ke-3, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Suhendi Hendi. *fiqih muamalah*. Jakarta: Raja Pers, 2014.

Taqoyudin An Nabhani, *An Nidlam Al-Istihadi Fil Islami (Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam)*, Surabaya: Risalah Gusti, 2002.

Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 4. Jakarta: Gramedia. 2008.

Wiwoho, *Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Penaku, 2014.

Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenaga Kerjaan.

E. Wawancara

Ani, Wawancara Dengan Penulis, Sukarame: 08 September 2019.